

**PENGUNAAN MEDIA MASSA OLEH WAKIL RAKYAT
(Studi Relasi DPRD Kabupaten Temanggung dan Media Massa)**



Skripsi

Disusun Guna Diajukan Kepada Fakultas Dakwah
Sebagai Sebagian Syarat Dalam Memenuhi Tugas Akhir
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial Islam Program (Strata-1)

Disusun oleh:

HIKMATUN NIDA SORAYA

NIM: 04210107

Dibawah bimbingan:

DR. H. AKHMAD RIFA'IL, M.PHIL.

NIP. 150228371

**JURUSAN KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAKSI
PENGUNAAN MEDIA MASSA OLEH WAKIL RAKYAT
(Studi Relasi DPRD Kabupaten Temanggung dan Media Massa)

Media merupakan sarana transformasi pesan kepada khalayak. Hal ini merupakan suatu metode yang dilakukan oleh lembaga pemerintah untuk menyampaikan hasil serta kebijakan lainnya agar kinerja yang telah dilakukannya sampai ke telinga publik. Proses ini sangat membutuhkan peran dari media itu sendiri. Di sisi lain, lembaga ataupun pihak yang membutuhkan media dapat dengan mudah melakukan transformasi pesan, di sisi lain media butuh akan informasi tersebut, karena fungsi dari media itu sendiri berperan dalam upaya mempublikasikan peristiwa yang memiliki unsur berita, termasuk apa saja yang berhubungan dengan kebijakan serta yang lainnya yang berhubungan dengan lembaga pemerintah.

Lembaga legeslatif memiliki peran dibidang pengawasan dan kontrol kepada eksekutif. Ini merupakan hal yang sangat menarik perhatian bagi media, karena fungsi dari legeslatif tersebut. Legeslatif berkewajiban untuk mengawasi aktifitas badan eksekutif agar sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkannya. Di pihak lain, badan legeslatif bertindak sebagai pembawa suara rakyat dan mengajukan perasaan-perasaan dan pandangan-pandangan yang berkembang secara dinamis dalam masyarakat.¹

Legeslatif mempunyai peran yang besar terhadap rakyat baik sebagai pembawa aspirasi rakyat ketika duduk dalam forum-forum dalam mengambil kebijakan serta peran kontrol bagi eksekutif merupakan faktor penting juga. Hal ini tentu saja pers andil untuk mendapatkan informasi yang cepat serta terkait dengan masyarakat umum. Masyarakat dapat mengetahui informasi serta kinerja legeslatif melalui media. Sehingga media berperan sangat penting dalam hal ini. Media adalah sarana bagi legeslatif untuk memberi segala informasi yang menyangkut rakyatnya dan rakyat menjadikan media sebagai alternatif sarana untuk memberi informasi. Ini merupakan hal yang saling kait-mengait antara legislait dan media.

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2005), hal.184-186.

Judul yang penulis angkat dalam hal ini terkait dengan penggunaan media yang dilakukan oleh wakil rakyat, yaitu DPRD Temanggung. Kota Temanggung merupakan kabupaten yang berada di wilayah Jawa Tengah. Kota ini belum memiliki surat kabar harian versi daerah sendiri. Ketidakmandirian ini tentu saja berhubungan dengan akses rakyatnya untuk mengetahui informasi secara detail di daerah tersebut. Hanya Stasiun Radio saja yang berkembang di sana. Hal itu tentu saja belum menjadikan Temanggung kota yang memiliki pers yang bebas. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap segala hal yang berhubungan dengan transformasi kebijakan dari atas ke bawah yang dalam hal ini merupakan fungsi dari DPRD setempat. DPRD merupakan lembaga legeslatif yang sarat akan segala informasi yang berhubungan dengan rakyat, baik sebagai motor aspirasi rakyat maupun segala kebijakan yang berhubungan dengan rakyat, lembaga tersebut yang berwenang. Jika kita melihat hal ini, tentu saja penulis ingin mengetahui bagaimana lembaga tersebut menyampaikan hal-hal yang menyangkut publik.

Media massa yang notabene sangat dibutuhkan oleh masyarakat, apakah memiliki akses yang cukup besar untuk mendapatkan informasi dari lembaga legeslatif di daerah tersebut. Ini merupakan pertanyaan yang besar akan perkembangan daerah yang selalu diberi label kebun tembakau ini.

Judul di atas memberikan pemahaman bahwa alternatif media sebagai sarana transformasi informasi dipergunakan secara optimakah oleh wakil rakyat.

Penelitian kualitatif yang dilakukan penulis akan mengambil metode deskriptif dengan metode pengumpulan data secara observasi, interview serta dokumentasi, baik dari DPRD maupun dari media itu sendiri. Baik dari media cetak, TV serta radio yang menjadi link dalam setiap pendokumentasian informasi dari legeslatif tersebut.

Rumusan Masalah:

Bagaimana hubungan kerja yang terjalin antara DPRD Kabupaten/Kota Temanggung periode 2004-2009 dengan media massa yang digunakan dalam proses penyampaian informasi ke khalayak umum?

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Hikmatun Nida Soraya

Nim : 04210107

Fakultas : Dakwah

Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Judul Skripsi : Penggunaan Media Massa oleh Wakil Rakyat

(Studi Relasi DPRD Kabupaten Temanggung dan
Media Massa)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari ada yang mengadopsi atau memperbanyak tanpa seijin penulis, maka akan kami tuntutan lewat jalur hukum.

Yogyakarta, 04 Agustus 2008



Yang Menyatakan,


Hikmatun Nida Soraya
NIM: 04210107

**DR. H. AKHMAD RIFA'I, M.PHIL.
DOSEN FAKULTAS DAKWAH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

NOTA DINAS

**Hal : Skripsi saudari Hikmatun Nida Soraya
Lamp. : 3 Eksemplar**

**Kepada:
Dekan Fakultas Dakwah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberikan perbaikan-perbaikan terhadap skripsi ini seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari:

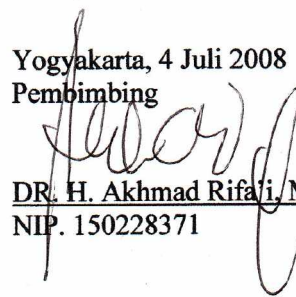
Nama : Hikmatun Nida Soraya
NIM : 04210107
Judul : Penggunaan Media Massa oleh Wakil Rakyat (Studi Relasi
DPRD dan Media Massa)

Maka skripsi ini sudah dapat diajukan dalam sidang munaqosah sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial Islam Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh karena itu, saya mohon kepada bapak agar mahasiswa yang bersangkutan dipanggil dalam sidang munaqosah untuk mempertanggungjawabkan.

Demikian nota dinas ini disampaikan atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Juli 2008
Pembimbing


DR. H. Akhmad Rifaji, M.Phil.
NIP. 150228371



DEPARTEMEN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH
Jl. Marsda Adisucipto, Telepon (0274) 515856 Fax (0274) 552230
Yogyakarta 55221

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DD/PP.00.9/1233/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

PENGUNAAN MEDIA MASSA OLEH WAKIL RAKYAT (Studi Relasi DPRD Kabupaten Temanggung Dan Media Massa)

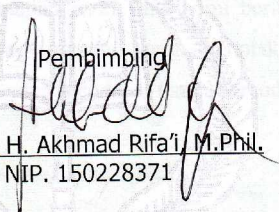
Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : **Hikmatun Nida Soraya**
NIM : 04210107
Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 23 Juli 2008
Nilai Munaqasyah : A -

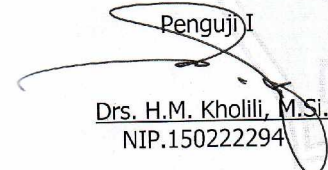
dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

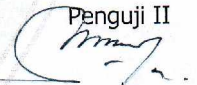
Pembimbing


Dr. H. Akhmad Rifa'i, M.Phil.
NIP. 150228371

Penguji I


Drs. H.M. Kholili, M.Si.
NIP.150222294

Penguji II


Drs. Hamdan Daulay, M.Si.
NIP. 150269255

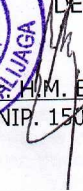
Yogyakarta, 31 Juli 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Dakwah

DEKAN




Prof. Dr. H.M. Bahri Ghazali, MA
NIP. 150220788

HALAMAN MOTTO

İ %ôggyèÎ / tbqèùqāf tūi İ %©! \$ #
tbqàÖà) Ztf Ÿwur «! \$ #
tūi İ %©! \$ # ur ÇĒĒĒ t, »sWŠİ Jø9\$ #
a! \$ # t•tBr& ! \$ tB tbqè=ÅĀtf
šcöqt±øfstur Ÿ@|¹qāf br& ý¾İ mÎ /
uäpqß™ tbqèù\$ sfstur öNåk ®5u'
tūi İ %©! \$ # ur ÇĒĒĒ É>\$ |; İ tø: \$ #
İ mō_ur uä! \$ tóÍ Gö/ \$ # (# rç Žy 9|¹
(# qāB\$ s%r & ur öNÍ k Í h5u'
\$ £Jİ B (# qà) xÿRr&ur no4qn=¢Á9\$ #
Zpu<İ Rÿx tāur # uŽÅ öNßg»uZø%y—u'
İ poY|; ptø: \$ \$ Î / šcrâäu' ô%tfur
öNçIm; y 7Í ' - »s9're& spy ¥Í hŠ; ; 9\$ #
ÇĒĒĒ Í ' # α\$! \$ # Öt<ø) ãã

20. (yaitu) orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian,
21. Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan², dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.
22. Dan orang-orang yang sabar Karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezki yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan; orang-orang Itulah yang mendapat tempat kesudahan (yang baik)

(QS. Ar-Ra'du: 20-22)³

² yaitu mengadakan hubungan silaturahmi dan tali persaudaraan.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama RI, 1981/1982), hlm. 372.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan
untuk orang tuaku tercinta;
Bapak Slamet Masykur Baehaqi (alm.) dan Ibu Hilyatus Shoimah
Kakak dan Adikku tersayang;
Mbak Hannah Rohayana dan Munir Akhyari
Semua keluarga besarku tersayang
Serta kepada Almamaterku UI N Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Illahi Robbi Allah SWT karena dengan rahmat, kasih sayang dan petunjuk-Nya, penyusunan skripsi sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat diselesaikan. Sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pembawa pelita kehidupan, pembawa perubahan dan pembawa cahaya, serta tumpuan harapan pemberi syafa'at di Yaumul Kiamah nanti.

Skripsi dengan judul “Penggunaan Media Massa oleh Wakil Rakyat” ini penulis susun untuk mengetahui relasi kerja yang tercipta antara DPRD Kabupaten Temanggung dengan Media Massa, baik cetak maupun elektronik dalam rangka mempublikasikan informasi yang terkait dengan hak-hak dan fungsi pengawasan DPRD kepada eksekutif terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya serta kebijakan daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah Kabupaten Temanggung.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud atau terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bahri Ghazali, M.A., selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. DR. H. Akhmad Rifa'i, M. Phil., selaku Ketua Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan nasihat, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Khoiro Ummatin, S.Ag., M.Si., selaku Pembimbing Akademik (PA).
4. Kepala Bagian Umum Rapat & Risalah DPRD Kabupaten Temanggung, Bapak Supriyanto, SH., selaku pembimbing lapangan yang telah bekerja sama dan membantu secara optimal, baik waktu, tenaga dan pikiran, guna penyelesaian proses penelitian.
5. Harie Kusworo, SH., Drs. Djoko Juwono, H. Taufan Sugiyanto, S. Pd., H. Iman Bintara, ST., dan Bapak Akhmad Masfudin, selaku anggota DPRD Kabupaten Temanggung sebagai sumber penelitian yang telah memberikan informasi untuk memenuhi data penelitian.
6. Bapak Henri Sofyan dan Bapak Heri Setyawan selaku wartawan SKH Suara Merdeka dan Wawasan, Bapak Rofi dan Ibu Lily Setyowati selaku Penanggungjawab Program *News* RT FM dan *Station Manager* Radio

Angkasa 7, Bapak Yon Daryono Saputro dan Bapak Kiswanto selaku Koresponden & Wartawan SCTV dan METRO TV yang telah meluangkan waktunya memberikan informasi sebagai sumber data dalam penelitian ini.

7. Teman-teman KPI 2004; Ain, Hani (Teteh), Brahma, Erni, Khotim, Vepti, dan Mila yang telah membantu berupa pikiran dan tenaga serta memberi motivasi dan doanya untuk penulis.
8. Teman Asrama Putri Anggun; Mbak Luluk, Agni, Erni, Mbak Witri dan Rena yang telah mendukung peneliti selama proses penyelesaian skripsi ini.
9. Teman organisasiku; Hima, Anton, Uut, Wahyu, Tri, Rois, Darsuki dan kawan-kawan, terima kasih atas pengertian kalian untuk memberi kesempatan penulis berkonsentrasi menyelesaikan skripsi ini, doamu, motivasimu, menjadi kekuatan bagi penulis. *Thanks guys.*
10. Semua pihak yang ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Harapan penulis, semoga amal kebaikan mereka semua mendapat balasan dari Allah SWT sebagai amal ibadah yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Akhirnya penulis berharap semoga karya ini bermanfaat dan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan Ilmu Komunikasi pada masa yang akan datang.

Yogyakarta, 4 Juli 2008

Penulis

HIKMATUN NIDA SORAYA
04210107

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAKSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Kajian Pustaka	8
G. Kerangka Teoritik	13
1. Tinjauan tentang Fungsi Media Massa	13
2. Tinjauan tentang Kedudukan dan Fungsi DPRD Kabupaten	22
3. Media massa dengan Wakil Rakyat	24
H. Metode Penelitian	29

1. Sumber dan Fokus Penelitian	30
2. Metode Pengumpulan Data	31
3. Validitas Data	34
4. Metode Analisa Data	36
BAB II MEDIA MASSA DAN PROFIL DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG	38
A. Media massa yang digunakan DPRD	38
B. Profil DPRD Kabupaten Temanggung	40
C. Penggunaan Media Massa oleh DPRD Kabupaten Temanggung	42
D. Materi dalam media massa	45
BAB III MEDIA MASSA DAN WAKIL RAKYAT	51
A. Relasi Kerja DPRD dengan Surat Kabar	52
1. Kebutuhan DPRD terhadap publikasi informasi	52
2. Sifat Keterbukaan Dewan	56
a. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi	56
b. Keterbukaan dalam memberikan akses informasi	63
B. Relasi Kerja DPRD dengan Televisi	71
1. Kebutuhan DPRD terhadap publikasi informasi	71
2. Sifat Keterbukaan Dewan	72
a. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi	72
b. Keterbukaan dalam memberikan akses informasi	75
C. Relasi Kerja DPRD dengan Radio Lokal Temanggung.....	82
1. Kebutuhan DPRD terhadap publikasi informasi	82

2. Sifat Keterbukaan Dewan	84
a. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi	84
b. Keterbukaan dalam memberikan akses informasi	84
BAB IV PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Kritik dan Saran	92
C. Kata Penutup	93
DAFTAR PUSTAKA	xv
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
SURAT-SURAT RISET	
BIOGRAFI PENULIS	

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENEGASAN JUDUL

Penegasan judul merupakan cara peneliti dalam memberi batasan dalam memaknai istilah-istilah yang terdapat pada judul peneliti pergunakan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami skripsi yang berjudul *Penggunaan Media Massa oleh Wakil Rakyat (Studi Relasi DPRD dan Media Massa)*. Oleh karena itu, peneliti menganggap perlu adanya penegasan istilah-istilah dalam judul tersebut, berikut ini:

1. Media Massa

Media massa yang peneliti maksudkan adalah dalam aspek penggunaannya, yaitu media yang digunakan oleh wakil rakyat dalam menjalankan fungsinya dalam rangka menyampaikan informasi ke publik. Peneliti hanya membatasi ke dalam tiga jenis media massa, yaitu surat kabar, televisi dan radio. Surat kabar terdiri atas: Suara Merdeka dan Wawasan. Televisi terdiri atas: SCTV dan Metro TV. Radio terdiri atas: RSPD dan Angkasa7.

2. Wakil Rakyat

Kata “Wakil Rakyat” yang dimaksud adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung, yang terdiri atas 6 fraksi, 4 komisi, dan 45 anggota.⁴

3. Relasi

Relasi yang dimaksud oleh peneliti adalah relasi kerja antara DPRD Kabupaten Temanggung dan media massa yang digunakan dalam rangka penyampaian informasi ke publik. Informasi tersebut terkait dengan hak-hak dan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan daerah, peraturan perundang-undangan lainnya serta kebijakan daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah Kabupaten Temanggung. Relasi kerja tersebut bukan pada wilayah adanya kontrak atau perjanjian kerjasama antara DPRD dengan Media Massa, melainkan relasi yang tercipta atas dasar masing-masing fungsi, peran dan kepentingan dalam rangka mempublikasikan hasil kinerja dewan melalui media massa. Media massa memiliki suatu tanggung jawab dalam menyebarkan informasi-informasi khususnya mengenai DPRD. Publikasi informasi dalam media massa tentunya melalui peran seorang wartawan atau reporter yang bekerja atas dasar kepentingan umum, yaitu menyebarkan informasi bagi masyarakat luas.

Jadi, yang dimaksud dalam judul di atas adalah relasi kerja yang tercipta antara DPRD Kabupaten Temanggung dan media massa. DPRD

⁴ Hasil wawancara dengan Bagian Umum Rapat & Risalah DPRD, Bapak Supriyanto, SH., pada tanggal 9 Mei 2008, pukul 09.00 WIB.

adalah lembaga yang mempunyai peran dan fungsi untuk menyampaikan informasi ke publik, yang terkait dengan hak-hak dan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya serta kebijakan daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah Kabupaten Temanggung. Penyampaian informasi tersebut melalui media massa, yaitu surat kabar yang terdiri atas: Suara Merdeka dan Wawasan. Televisi terdiri atas: SCTV dan METRO TV. Radio terdiri atas: RSPD dan Angkasa 7.

B. LATAR BELAKANG MASALAH

Media massa berperan sangat signifikan didalam penyampaian informasi ke khalayak ramai. Informasi merupakan sebuah berita yang mempunyai nilai dan layak untuk dipublikasikan. Semakin berkembangnya teknologi, media massa semakin banyak kita jumpai dan nikmati. Teknologi menjadi sumber perkembangan dan kemajuan bagi media massa. Oleh sebab itu, saat ini banyak media massa yang lahir dan berkembang di tengah masyarakat. Saat ini media massa yang *familiar* ditelinga kita adalah media elektronik, seperti televisi dan radio serta media cetak, seperti surat kabar. Media massa tersebut tentunya sangat berperan dalam publikasi informasi, baik oleh institusi pemerintah yang merupakan pusat segala informasi menyangkut kebijakan yang dibutuhkan oleh rakyat, maupun lembaga lain yang membutuhkan peran media massa dalam rangka menyampaikan informasi penting agar dapat dikonsumsi oleh publik.

DPRD Kabupaten/Kota merupakan institusi pemerintah yang menempati wilayah daerah kabupaten. Pemerintah lokal tersebut tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kemajuan daerah. Peran DPRD Kabupaten/Kota dalam mengembangkan daerahnya, tentunya terangkum dalam fungsi kontrol dan hak-hak yang dimilikinya terkait dengan pemerintah setempat. DPRD mempunyai tugas dalam pembuatan UU, kebijakan dan peraturan lainnya bersama dengan eksekutif untuk mengatur sistem kinerja pemerintahan. Sehingga melalui fungsi kontrol atau pengawasannya dewan selalu mengawasi kinerja eksekutif, apakah menjalankan roda pemerintahan secara benar sesuai dengan UU dan peraturan daerah lainnya yang menjadi sandarannya. Hal ini perlu adanya proses transformasi segala informasi yang terkait dengan kepentingan rakyat melalui peran media massa.

Jika kita perhatikan, setelah selama lebih dari 32 tahun kita berada dalam masa pemerintahan otoriter, kebebasan pers dan media dalam mempublikasikan yang berkaitan dengan isu-isu pemerintah dibungkam. Hal ini menimbulkan ketidaktahuan dan kemiskinan informasi yang terjadi oleh rakyat. Pemerintah tidak terbuka dan tidak transparansi menjadi faktor penyebab tidak terjalinnya relasi yang harmonis antara rakyat dan pemerintah. Salah satu cara terbaik memahami relasi antara pers dan pemerintah adalah dengan menyimak relasi antara pers dengan para presiden, yang kredibilitasnya saat ini juga ditentukan oleh sejauh mana pembelaannya

terhadap prinsip kebebasan pers.⁵ Maksudnya adalah apakah relasi yang tercipta antara pemerintah dan media massa mengandung makna saling mendukung dan membutuhkan dalam setiap kegiatannya. Media massa diberi peran dalam fungsinya secara optimal, sehingga kebutuhan informasi dapat tersalur dengan lancar. Disamping itu, pemerintah memiliki peran dalam pembangunan masyarakat ke arah yang lebih baik. Tentunya tujuan ini didukung jika pemerintah dan media massa saling bekerjasama dengan baik. Hal apa yang terjadi, jika tidak terjalinnya komunikasi antara pemerintah dengan rakyatnya. Berbagai macam kebijakan negara tidak tersosialisasikan dan terlaksana dengan baik.⁶

Media massa menjadi sarana yang tepat dipergunakan oleh pemerintah untuk menyalurkan segala hal yang berhubungan dengan rakyat. Media massa menjadi media informasi publik yang cepat bisa rakyat terima. Oleh sebab itu, peran kontrol media massa terhadap pemerintah tentu saja menjadi sangat penting. Kinerja dewan akan terpublikasikan dan masyarakat mengetahui keadaan yang sedang terjadi dalam pemerintahannya. DPRD Kabupaten Temanggung merupakan salah satu lembaga legislatif yang memanfaatkan media massa dalam menyalurkan aspirasi dari, oleh dan untuk rakyat. Namun, yang dikaji disini adalah relasi yang tercipta diantara dua pihak, DPRD dan media massa; TV, Radio Lokal Temanggung dan Surat Kabar. Pada dasarnya idealitas yang seharusnya tercipta antara pemerintah dan

⁵ William L. Rivers, dkk, *Media Massa dan Masyarakat Modern, Edisi Kedua*, Terj. Haris Munandar dan Dudy Priatna, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 119.

⁶ Nurudin, *Sistem Komunikasi Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 54.

media massa adalah pemerintah melaksanakan semua tugas dengan sebaik-baiknya, serta pers selaku bagian dari media massa bebas dan independen harus memantaunya secara cermat.⁷

Era demokrasi yang dialami oleh bangsa Indonesia saat ini, tentunya mengakibatkan perubahan dalam berbagai sektor, termasuk dunia pers dan media massa yang saat ini sedang dalam masa kemerdekaannya, setelah terbungkam di Era Orde Baru. Oleh sebab itu, media massa saat ini menjadi sarana penting yang menjadi penghubung komunikasi antara pemerintah dan rakyat. Hal ini berdasarkan pada kedua institusi tersebut memiliki peran yang sama, yaitu memihak kepentingan rakyat. Pemerintah sebagai lembaga mengatur segala sistem pemerintahan, sedangkan media massa adalah sarana yang dipakai dalam rangka penyebaran informasi terkait dengan segala kinerja dilakukan pemerintah. Pemerintah, dalam hal ini DPRD Kabupaten Temanggung membutuhkan media massa sebagai alat dalam komunikasi massa, begitu pula dengan media massa yang membutuhkan akses informasi dari DPRD tersebut. Oleh sebab itu, peneliti sangat tertarik untuk menelitinya, karena peneliti sebagai bagian dari rakyat yang lahir di kota Temanggung, membutuhkan pengetahuan mengenai relasi kedua institusi tersebut yang diharapkan akan mendapatkan gambaran mengenai kinerja selama ini yang dilakukan oleh DPRD apakah sudah tersalurkan secara baik melalui media massa, dan media massa yang merupakan sarana komunikasi

⁷ *Ibid.*

antara DPRD dengan masyarakat, apakah memperoleh akses yang luas dalam menggali informasi dari DPRD setempat.

C. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang peneliti rumuskan adalah:

Bagaimana relasi kerja antara DPRD Kabupaten Temanggung dengan media massa yang digunakan dalam proses penyampaian informasi ke khalayak umum?

D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang media massa yang digunakan oleh DPRD Kabupaten Temanggung dalam menyampaikan aspirasi dari, oleh dan untuk rakyat.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan mengenai relasi kerja antara DPRD Kabupaten Temanggung dan media massa yang digunakan dalam rangka penyampaian informasi ke publik terkait dengan hak-hak dan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya serta kebijakan daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah Kabupaten Temanggung.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan ide bagi perkembangan ilmu komunikasi, khususnya memperdalam tentang relasi kerja yang tercipta antara dua institusi, yaitu media massa dengan pemerintah (DPRD Kabupaten Temanggung).
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi institusi tertentu dalam menjalin relasi dengan institusi lain, khususnya antara institusi pemerintah dengan pihak media massa yang memiliki fungsi penyebaran informasi ke masyarakat luas.

F. KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka adalah uraian tentang kajian teoritik yang relevan dengan masalah yang diteliti. Kajian pustaka berguna untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan. Selain itu kajian pustaka dapat digunakan untuk melihat pendapat terkait dengan persoalan yang diteliti.⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Budi Satriya Wibisono dengan judul *“Pelaksanaan Fungsi Perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Perspektif Komunikasi Politik” (Studi Penelitian Deskriptif pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY))*, berisi tentang media massa adalah sarana yang efektif dalam

⁸ Zarkasji Abdul Salam, dkk, *Pedoman Penelitian IAIN Sunan Kalijaga*, (Yogyakarta: Balai Penelitian P3M IAIN Sunan Kalijaga, 1996), hlm. 21

menyampaikan informasi ke masyarakat oleh Dewan. Penelitian tersebut menyangkut media massa menjadi saluran efektif nomor dua yang digunakan oleh anggota dewan dalam rangka mendapatkan maupun menyampaikan informasi dari, oleh dan untuk rakyat. Didalam menyerap, merumuskan, kemudian menyampaikan aspirasi masyarakat, para anggota dewan lebih memilih menggunakan atau memanfaatkan media massa disamping melalui organisasi masyarakat atau partai yang menjadi media paling efektif. Informasi yang berasal dari anggota dewan perlu untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Transparansi informasi ini sangat perlu dilakukan agar masyarakat dapat secara proaktif mengetahui dan mengkritisi berbagai kebijakan dewan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya relasi kerjasama antara pihak dewan dengan media massa dalam menjalankan peran dan fungsinya masing-masing. Teori yang dipergunakannya lebih banyak pada teori-teori politik. Peneliti ini menyajikan fungsi-fungsi DPR (fungsi legislate, fungsi kontrol, fungsi perwakilan). Fungsi perwakilan yang digunakannya, terdiri atas 4 macam teori, yaitu teori mandat, teori organ, teori sosiologi dan teori hukum obyaktif.⁹

Penelitian oleh Urip Prasetyo juga menghasilkan penelitian yang sama dengan penelitian di atas, adapun perbedaan terletak pada tahun dan lokasi penelitian. Hasil penelitian kedua peneliti tersebut memberi kesimpulan bahwa media massa merupakan saluran yang digunakan oleh anggota dewan

⁹ Budi Satriya Wibisono, “Pelaksanaan Fungsi Perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Perspektif Komunikasi Politik” (*Studi Penelitian Deskriptif pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)*), (Skripsi, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD), 2002).

dalam menyampaikan aspirasi dari, oleh dan untuk rakyat, namun saluran yang efektif nomor dua setelah melalui organisasi masyarakat atau partai.¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad dengan judul “*Peran Pers sebagai Media Informasi Politik*” (*Studi Deskriptif tentang Respon Masyarakat Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan. Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tentang Peran Media Massa Kedaulatan Rakyat sebagai Media Informasi Politik*”. Adapun hasil penelitian tersebut adalah media cetak, surat kabar Kedaulatan Rakyat mampu mengakses informasi politik (menyangkut pemerintah) untuk para pembaca. Hal ini berguna untuk membangun kesadaran politik bagi masyarakat sehingga masyarakat tidak buta politik. Pers sebagai lembaga masyarakat merupakan bagian dari kehidupan masyarakatnya, maka pers tidak bisa memisahkan diri dari kehidupan masyarakat. Muhammad menggunakan Teori Pers Otoriter, Teori Pers Liberal, Teori Pers Komunis dan *Responsibility Pers Theory*. Ia mengungkapkan mengenai penggolongan relasi pers dengan pemerintah, yaitu: *Pertama*, pers dan pemerintah mempunyai kedudukan yang seimbang dan berjalan sendiri-sendiri. *Kedua*, pers bekerjasama dengan pemerintah dengan posisi tawar-menawar yang seimbang. *Ketiga*, pers adalah alat pemerintah. (Penggolongan relasi ini ia kutip dari Ana Nadhyar Abror: 1995: 12)¹¹

¹⁰ Urip Prasetyo, “*Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Komunikasi Politik*” (*Studi Penelitian Deskriptif tentang Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Wonosobo*), (*Skripsi*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD), 2003).

¹¹ Muhammad, “*Peran Pers sebagai Media Informasi Politik*” (*Studi Deskriptif tentang Respon Masyarakat Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan. Kabupaten Bantul, Provinsi*

Penelitian yang terkait dengan analisis pola relasi antara SBY dan partai Demokrat dilakukan oleh Ilham Sulung dalam penelitiannya. Adapun hasil penelitian yang dilakukan memberi pengetahuan bahwa relasi yang terjalin antara Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat bersifat ikatan emosional, dimana Susilo Bambang Yudhoyono adalah pencetus ide dan gagasan bagi Partai Demokrat sehingga memberi kontribusi yang sangat besar, misalnya memberi banyak masukan mengenai AD/ART partai. Disamping itu, figur beliau memberi kontribusi dalam menaikkan nama Partai Demokrat di urutan ke-5 dalam pemilu legislatif, sehingga mampu membawa Susilo Bambang Yudhoyono ke kursi Presiden. Adapun di lain pihak, tubuh partai tersebut akan terjadi krisis kepemimpinan, karena Partai Demokrat sangat tergantung dengan peran besar Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu, Partai Demokrat mengalami krisis identitas, jika tidak menampakkan ideologi yang jelas. Ilham menggunakan 3 pola relasi dalam landasan teorinya, yaitu *Pola Akomodasionis*, *Pola Pragmatis* dan *Pola Idealis*. Pola Akomodasionis, menunjuk pada tingkah laku politis yang mengembangkan kerjasama dan relasi baik dengan kelompok atau organisasi tertentu secara kritis tanpa mengintegrasikan diri (netral) dalam lingkaran kekuatan politik. Pola Pragmatis, menunjuk pada tingkah laku politik yang mengembangkan kerjasama dan relasi baik dengan organisasi atau kelompok tertentu dan cenderung ikut aktif langsung dalam kelompok tersebut. Pola Idealis, menunjuk pada tingkah laku politik yang cenderung mengambil jarak dan

Daerah Istimewa Yogyakarta, tentang Peran Media Massa Kedaulatan Rakyat sebagai Media Informasi Politik. (Skripsi, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD), 2005).

menolak untuk mengintegrasikan diri dalam lingkaran kekuasaan kedalam sampai batas tertentu tidak menolak untuk mengembangkan kerjasama dan menjalin relasi baik dengan organisasi/kelompok/partai.¹²

Penelitian dengan judul “*Penggunaan Media Massa oleh Wakil Rakyat*” (*Relasi DPRD dan Media Massa*), belum pernah ada yang menelitinya, namun terdapat beberapa penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas di luar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yaitu APMD (Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa) dan UMY (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) memiliki esensi yang hampir sama. Kedua peneliti dari APMD melakukan penelitian yang terkait mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memilih saluran media massa sebagai sarana penyampaian informasi ke publik. Media massa mampu memberi informasi mengenai publik kepada Dewan. Penelitian yang dilakukan oleh Budi Satriya Wibisono dan Urip Prasetyo, menunjukkan adanya kesamaan dengan peneliti dalam hal penggunaan media massa oleh dewan (pemerintah). Sedangkan penelitian yang dilakukan Muhammad, terkait dengan peran pers sebagai lembaga informasi politik dan mendapatkan akses terkait pemerintah yang dibutuhkan masyarakat. Oleh sebab itu, ketiga penelitian di atas peneliti posisikan sebagai pembanding bahwa di lembaga DPRD Kabupaten Temanggung juga menggunakan media massa dalam menjalankan fungsinya untuk menyalurkan informasi ke publik. Adapun penelitian yang dilakukan

¹² Ilham Sulung, “*Analisis Pola Relasi Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat dalam Politik di Indonesia*” (*The Analysis of Susilo Bambang Yudhoyono and Democratic Party Relations Pattern in Indonesia Politics*), (Skripsi, Yogyakarta: TT. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2006).

oleh Ilham Sulung menyangkut tentang analisis pola relasi, peneliti memposisikan penelitiannya sebagai gambaran hasil analisis relasi yang tercipta antara dua pihak yang saling membutuhkan.

Adapun yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah peneliti tidak menggali sejauh mana tingkat efektifitas media massa sebagai saluran yang dinilai efektif oleh anggota dewan, akan tetapi peneliti mencari relasi kerja antara dua pihak, yaitu DPRD Kabupaten Temanggung dengan media massa yang digunakan dalam melaksanakan fungsi dan peran sebagai institusi pemberi dan penyalur informasi ke publik.

G. KERANGKA TEORITIK

1. Tinjauan tentang Fungsi Media Massa

a. Pengertian Media Massa

Menurut Jay Back dan Frederick C. Whitney dalam buku karya Nurudin, media massa merupakan media mekanis yang digunakan dalam komunikasi massa.¹³ Disamping itu, di dalam buku karya Nurudin yang lain, beliau memaparkan bahwa media massa merupakan saluran berdasarkan teknologi modern yang digunakan dalam komunikasi massa.¹⁴ Senada dengan Nurudin, Wiryanto memaknai media massa adalah peralatan mekanik yang digunakan sebagai alat dalam komunikasi massa.¹⁵ Pengertian tentang media massa juga

¹³ Nurudin, *Pengantar Komunikasi Massa*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 5.

¹⁴ Nurudin, *Komunikasi Massa*, (Yogyakarta: CESPUR, 2003), hlm. 2.

¹⁵ Wiryanto, *Teori Komunikasi Massa*, (Jakarta: PT Grasindo, 2000), hlm. 2.

diungkap oleh Onong Uchjana Effendy dalam bukunya yang berjudul “Dinamika Komunikasi”. Menurutnya, media massa adalah sarana untuk menyampaikan pesan kepada khalayak, bukan untuk sekelompok orang tertentu, karena media massa sifatnya umum dan karena itu ditujukan untuk umum.¹⁶

b. Fungsi dan Peran Media Massa

Media massa memiliki 4 fungsi utama, diantaranya:¹⁷

- 1) Menyiarkan informasi (*to inform*)
Fungsi ini merupakan fungsi yang pertama dan utama. Informasi dibutuhkan oleh khalayak, karena mereka membutuhkan informasi mengenai peristiwa yang terjadi, gagasan atau pikiran orang lain, apa yang dilakukan oleh orang lain, dan sebagainya.
- 2) Mendidik (*to educate*)
Fungsi yang kedua ialah mendidik. Sebagai sarana pendidikan massa, media massa memuat informasi yang mengandung pengetahuan. Media cetak misalnya, memuat tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga khalayak pembaca bertambah pengetahuannya.
- 3) Menghibur (*to entertain*)
Fungsi menghibur dalam media massa terutama cetak bertujuan untuk mengimbangi berita-berita berat (*hard news*) dan artikel yang berbobot. Isi surat kabar dan majalah yang bersifat hiburan dapat berbentuk cerita pendek, cerita bergambar, teka-teki silang, tajuk rencana, dan dapat juga berupa berita yang mengandung minat insani (*human interest*).
- 4) Mempengaruhi (*to influence*)
Fungsi mempengaruhi ini yang menyebabkan media massa memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Pers *independent*, bebas menyatakan pendapat, bebas melakukan kontrol sosial yang memberi pengaruh kuat dalam masyarakat. *Statement* dari Napoleon, dalam buku Ilmu Komunikasi; Teori dan Praktek, karya Onong Uchjana Effendy, menyatakan bahwa dia lebih takut kepada empat surat kabar dari pada seratus serdadu dengan senapan bersungkur terhunus.

¹⁶ Onong Uchjana Effendy, *Dinamika Komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 53.

¹⁷ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi; Teori dan Praktek*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 149-150.

Pernyataan mengenai keempat fungsi di atas juga diungkap oleh Sam Abede Pareno, dalam bukunya yang berjudul *Media Massa antara Realitas dan Mimpi*. Ia menyatakan bahwa fungsi adalah suatu tugas khusus yang dibebankan pada sesuatu. Fungsi media massa adalah tugas khusus yang dibebankan pada media massa. Keempat fungsi yang telah disebutkan di atas, melekat dalam media massa secara utuh, dalam arti harus dilaksanakan secara bersama-sama, tidak boleh mengutamakan satu atau dua fungsi dan mengabaikan fungsi-fungsi lainnya. Ia mengatakan bahwa fungsi media massa sesungguhnya hanya satu, namun dipilah-pilah menjadi empat fungsi, atau dengan kata lain ia menyebut *four in one function*.¹⁸

Terdapat juga fungsi tambahan, yaitu:¹⁹

- 1) Membimbing (*to guide*)
- 2) Mengeritik (*to criticise*)
- 3) Menurut Onong Uchjana, dalam buku *Dinamika Komunikasi*, fungsi mempengaruhi (*to influence*) merupakan fungsi tambahan.

Fungsi lain dari media massa, adalah sebagai *kontrol sosial* (*social control*). Rosihan Anwar (mantan wartawan senior Indonesia) mengatakan, sehubungan dengan keterkaitan pers sebagai alat kontrol sosial yang berarti pula mempunyai keterkaitan erat dan besar dengan pemerintah. Pernyataan ini dikutip dalam buku *Pers dalam Lipatan Kekuasaan*, karya Nurudin. Sesuai dengan pernyataan di atas, maka media massa dipengaruhi dengan keberadaan pemerintah. Oleh sebab

¹⁸ Sam Abede Pareno, *Media Massa antara Realitas dan Mimpi*, (Surabaya: Papyrus, 2005), hlm. 7-8.

¹⁹ Onong Uchjana Effendy, *op cit.*, hlm. 54.

itu, persoalan-persoalan politik menjadi konsekuensi logis yang harus diterima pers sebagai nilai yang melekat.²⁰ Fungsi-fungsi tersebut merupakan suatu peran suatu media untuk menunjukkan berita yang memiliki nilai berita yang mengandung sisi; *aktualitas* (berita hangat), *proximity/kedekatan* (kedekatan geografis, maupun emosional dengan pembaca), *penting* (memberitakan tentang orang yang memiliki kedudukan yang penting dan ternama maupun memberitakan suatu hal yang penting berdasarkan kepentingan khalayak), *keluarbiasaan* (berita yang menjadi di luar kebiasaan selalu menjadi perhatian orang banyak), *akibat yang ditimbulkan* (peristiwa yang mampu menimbulkan akibat yang luas bagi masyarakat), *ketegangan* (peristiwa yang menimbulkan hasil akhir berupa keberhasilan maupun kegagalan), *konflik atau pertentangan* (peristiwa yang memunculkan perbedaan pendapat antara dua pihak yang saling berseberangan), *seks* (fitrah manusia yang sangat universal bagi seluruh umat di dunia), *kemajuan* (perkembangan atau penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi), *emosi* (sebuah peristiwa yang mampu menggugah emosi atau perasaan setiap orang), *humor* (sesuatu yang mengandung kelucuan dan menghibur).²¹

Jadi, terdapat tujuh fungsi dari media massa yang dapat diketahui, yaitu menyiarkan informasi (*to inform*), mendidik (*to educate*), menghibur (*to entertain*), mempengaruhi (*to influence*), membimbing (*to guide*), mengeritik (*to criticise*), kontrol sosial (*social control*).

²⁰ Nurudin, *Pers dalam Lipatan Kekuasaan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2003), hlm. 14.

²¹ Aceng Abdullah, *op cit.*, hlm. 53-65.

Fungsi media massa yang pertama, sebagai penyebar informasi terkait dengan fungsinya sebagai media yang melaksanakan tanggung jawab sosial. Teori tanggung jawab sosial ini lahir dari Theodore Peterson. Teori ini merumuskan lima persyaratan pers (media massa) dalam menjalankan fungsinya, yaitu: *Pertama*, memberikan informasi yang terkait dengan peristiwa-peristiwa sehari-hari yang benar, lengkap dan berpekerti dalam konteks yang mengandung makna. *Kedua*, memberikan pelayanan sebagai forum untuk saling tukar menukar komentar dan kritik (sesuai dengan fungsi keenam di atas). *Ketiga*, memproyeksikan gambaran yang mewakili kelompok inti dalam masyarakat. *Keempat*, bertanggung jawab atas penyajian disertai penjelasan mengenai tujuan dan nilai-nilai masyarakat. *Kelima*, mengupayakan akses sepenuhnya pada peristiwa-peristiwa sehari-hari. Teori ini berpijak pada konsep kemerdekaan positif, yaitu *kebebasan untuk*, yaitu yang menghendaki menjadi sarana untuk mencapai tujuan yang diinginkan.²² Teori Tanggung Jawab Sosial tersebut menganggap bahwa pemerintah tidak hanya mengizinkan adanya kebebasan, tetapi turut mempromosikannya. Teori ini merupakan suatu konsep yang mementingkan tanggung jawab media massa kepada masyarakat. Menurut Rachmadi, dalam buku *Pers dalam Lipatan Kekuasaan*, karya Nurudin, bahwa pers (media massa) berfungsi sebagai alat kontrol sosial juga dapat berperan dalam menyampaikan kebijaksanaan dan

²² Onong Uchjana Effendy, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 272.

program pembangunan kepada masyarakat. Sesuai dengan teori tanggung jawab sosial di atas, maka media massa tidak dapat terpisahkan dari fungsinya sebagai alat yang turut bertanggung jawab terhadap persoalan masyarakat. Hal ini dapat dikatakan bahwa media massa dengan masyarakat mempunyai relasi yang saling menguntungkan.²³

Jika kita perhatikan dari ketujuh fungsi media massa di atas serta berdasarkan Teori Tanggung Jawab Sosial tersebut, media massa memiliki peran yang sangat signifikan.

Peranan media massa adalah pelaksanaan fungsi media massa. Fungsi dan peranan, dalam banyak kesempatan dicampuradukan. Banyak kalangan media massa, ketika mempraktikkan peranannya mengatasnamakan fungsi.²⁴ Memiliki fungsi sebagai publikasi informasi sekaligus mendidik, tentunya media massa tidak boleh menyiarkan sesuatu yang bisa merugikan masyarakat banyak. Berdasarkan UU Pers, media massa hendaknya mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar. Ditekankan pula bahwa media massa berfungsi untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Selain itu, melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.²⁵ Hal ini berdasarkan fungsi keenam dari media massa di atas, yaitu fungsi mengkritik (*criticise*). Menurut Lippman, dalam buku

²³ Nurudin, *op cit.*, hlm. 16.

²⁴ Sam Abede Pareno, *op cit.*, hlm. 14.

²⁵ *Undang-Undang RI No. 32 Th. 2002 dan Peraturan Menkominfo Th. 2007 Tentang Penyiaran dan Undang-Undang RI No. 40 Th. 1999 Tentang Pers*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 442.

karya Dan Nimmo, menyebutkan bahwa fungsi kebenaran adalah menyingkapkan fakta yang tersembunyi, menempatkannya dalam relasi satu sama lain, dan membuat gambaran tentang realitas yang dapat mendasari tindakan orang.²⁶ Media massa memiliki kebebasannya dalam berbicara, selama ia melakukan dengan “tulus”. Artinya, kritik atau kecaman boleh dilontarkan selama tujuannya menegakkan kebenaran, bukan menjatuhkan seseorang secara sengaja.²⁷

Wartawan media massa merupakan suatu pihak yang dianggap selalu memberitakan hal-hal yang negatif dengan pemberitaan objektif yang mampu mendeskreditkan pihak pemerintah. Pejabat tersebut akan menghindari wartawan yang ingin mencari berita darinya. Hal ini dikarenakan hubungan antara sumber berita atau dalam hal ini pejabat pemerintahan tersebut dapat dikatakan tidak akrab, sehingga penilaian negatif tentang wartawan pun akan muncul, meskipun penilaian itu sebenarnya hanyalah mitos. Seorang wartawan media massa tentunya tidak akan memberitakan informasi yang subyektif.²⁸

Menurut Aceng Abdullah dalam buku karyanya, *Press Relations*, ia menyatakan bahwa, terdapat dua macam *amplop* yang dapat diberikan kepada seorang wartawan media massa, diantaranya: *Pertama*, amplop sebagai suap, yaitu amplop yang diberikan kepada seorang wartawan agar tidak menulis berita yang dikonfirmasikannya, karena biasanya

²⁶ Dan Nimmo, *Komunikasi Politik; Komunikator, Pesan dan Media*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 220.

²⁷ William L. Rivers, dkk, *op cit.*, hlm. 162-163.

²⁸ Aceng Abdullah, *Press Relations; Kiat Berhubungan dengan Media Massa*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2000), hlm. 34.

orang atau lembaga yang mendatangi wartawan bisa mengganggu kedudukan atau goyahnya lembaga atau perusahaan tersebut. *Kedua*, amplop sebagai uang transportasi, yaitu amplop yang diberikan oleh seseorang atau lembaga humas yang mengundang wartawan dalam suatu acara jumpa pers yang sudah dianggarkan dalam kepanitiaan sebagai pengganti uang bensin dan diberikan secara sukarela.²⁹

c. Macam-macam Media Massa³⁰

Media massa memiliki berbagai macam jenis, diantaranya:

1) Media Elektronik

Media massa jenis ini dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu radio dan televisi.

2) Media Cetak

Media jenis ini juga terbagi dalam beberapa bagian, yaitu surat kabar, majalah dan tabloid.

3) Buku

4) Film

Film yang dimaksud dalam hal ini adalah film bioskop dan bukan film negatif yang dihasilkan oleh kamera.

5) Internet

Menurut Nurudin, belum ada bentuk media dari definisi komunikasi massa yang memasukkan internet dalam media massa, padahal jika ditinjau dari ciri, fungsi dan elemennya,

²⁹ *Ibid*, hlm. 46-47.

³⁰ Nurudin, *Komunikasi Massa*, (Yogyakarta: CESPUR, 2003), hlm. 3-4.

internet dapat dikategorikan dalam bentuk komunikasi massa. Hal ini dikarenakan, definisi-definisi yang dibuat merupakan produk definisi yang dibuat beberapa puluh tahun yang lalu.

Model komunikasi dari Harold Lasswell dianggap oleh para pakar komunikasi sebagai salah satu teori komunikasi yang paling awal dalam perkembangan teori komunikasi (1948). Lasswell menyatakan bahwa cara yang terbaik untuk menerangkan proses komunikasi adalah menjawab pertanyaan: *Who Says In Which Channel To Whom With What Effect* maksudnya, Siapa Mengatakan Apa Melalui Saluran Apa Kepada Siapa dengan Efek apa. Jawaban bagi pertanyaan paradigmatis Lasswell tersebut merupakan unsur-unsur proses komunikasi, yaitu komunikator (*Communicator*), pesan (*Message*), media (*Media*), komunikan/penerima (*Receiver*) dan efek (*Effect*).³¹ Meskipun terdapat lima komponen dalam komunikasi menurut Lasswell, media adalah menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Oleh sebab itu, dari kelima jenis media massa di atas tidak akan penulis masukkan semua dalam penelitian ini. Peneliti dalam hal ini hanya akan menekankan pada tiga jenis media massa, yaitu Surat Kabar, Televisi dan Radio.

³¹ Onong Uchjana Effendy, *op cit.*, hlm. 253.

2. Tinjauan tentang Kedudukan dan Fungsi DPRD Kabupaten/Kota

a. Kedudukan dan Fungsi DPRD Kabupaten/Kota

DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah kabupaten/kota.

DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:³²

- 1) Legislasi
- 2) Anggaran
- 3) Pengawasan/kontrol

Fungsi Pengawasan/Kontrol merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan badan perwakilan rakyat yang berkenaan dengan keputusan yang telah dikeluarkannya dalam bentuk undang-undang. Eksekutif dan Yudikatif merupakan lembaga yang bertindak sebagai pelaksana. Oleh karena itu, perlu adanya penilaian apakah cukup tepat melaksanakan keputusan tersebut. Kedua pengawasan itu merupakan konsekuensi dari kekuasaan rakyat yang dioperasikannya. DPRD sebagai pemegang mandat kekuasaan, bertanggung jawab atas pemanfaatan mandat tersebut kepada pemberinya. Badan perwakilan rakyat merupakan lembaga politik, bahwa penggunaan kekuasaan rakyat yang ada ditangannya diproses berdasarkan tata cara atau proses politik, maka pengawasan yang dilakukannya tentu bersifat politis. Walaupun demikian, sebagai pengawas, lembaga ini memerlukan data dan keterangan yang memadai. Bahan itu dapat diperoleh melalui kerjasama

³² *Undang-Undang Partai Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 88.

dengan berbagai pihak, seperti lembaga pengawasan keuangan, politisi, kalangan media massa, disamping itu para staf ahli lembaga tersebut.³³

b. Tugas dan Wewenang DPRD³⁴

- 1) Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Bupati/Walikota untuk mendapat persetujuan bersama.
- 2) Menetapkan APBD Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Bupati/Walikota.
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan Bupati/Walikota, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah.
- 4) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati atau Walikota/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- 5) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah.
- 6) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati/Walikota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.

c. Hak-hak DPRD³⁵

DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak:

- 1) Interpelasi
- 2) Angket
- 3) Menyatakan Pendapat

Anggota DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak:

- 1) Mengajukan rancangan peraturan daerah
- 2) Mengajukan pertanyaan
- 3) Menyampaikan usul dan pendapat
- 4) Memilih dan dipilih
- 5) Membela diri
- 6) Imunitas
- 7) Protokoler
- 8) Keuangan dan administratif

51. ³³ Arbi Sanit, *Perwakilan Politik di Indonesia*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), hlm. 48-

³⁴ *Undang-Undang Partai Politik, op cit.*, hlm. 88-89.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 89-91.

d. Alat Kelengkapan dan Sekretariat DPRD

Alat kelengkapan DPRD Kabupaten terdiri atas: Pimpinan, Panitia Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Panitia Anggaran, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan.³⁶

3. Media Massa dengan Wakil Rakyat

Media massa dalam mencari dan mengumpulkan bahan, harus melakukan penyeleksian untuk dapat dimasukkan dalam saluran yang memiliki kapasitas terbatas. Sementara, pola relasi antara penyeleksi (selektor) dengan sumber sangatlah bervariasi, sehingga peran yang terkait pun demikian adanya. Beberapa situasi utama dari hal tersebut di atas, dapat diidentifikasi sebagai berikut:³⁷

- 1) Kontak berkesinambungan dengan orang “dalam” yang mengetahui banyak informasi dan para ahli, mengenai berbagai berita atau aktualitas hangat agar secara cepat bisa memperoleh informasi yang dapat dipercaya. Hal ini tidak mungkin diperoleh tanpa adanya kontak semacam itu, terutama dalam persaingan ketat sekarang ini.
- 2) Kontak berkesinambungan tersebut juga diupayakan oleh mereka yang akan menjadi sumber berita itu sendiri, dengan maksud untuk memupuk relasi baik dengan pihak-pihak yang mungkin akan memberikan manfaat. Hal tersebut dilakukan terutama oleh para aktor politik, perusahaan besar, dan institusi pemerintah.
- 3) Pengamatan langsung dan pengumpulan informasi yang melaporkan peristiwa sehari-hari, juga merupakan sumber bagi media berita.

Seorang wartawan media massa dalam menjalankan kegiatan jurnalistiknya dalam rangka mendapatkan informasi dari sumber berita tentunya mempertimbangkan kredibilitas seseorang, yaitu orang nomor satu atau orang yang memiliki kedudukan paling tinggi dalam

³⁶ *Ibid.*, hlm. 109.

³⁷ Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa; Suatu Pengantar, Edisi Kedua*, Terj. Agus Dharma, dkk, (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm. 156.

lingkungannya. Selain itu, dia adalah orang yang terkenal atau terkemuka, ahli atau pakar di bidangnya, memiliki wewenang untuk berbicara dengan media massa, serta berprestasi atau unggul. Wartawan juga akan mempertimbangkan seorang sumber berita, yaitu orang yang memiliki ketajaman analisis, orang yang kaya dengan data dan informasi mutakhir, orang yang berani, orang yang mampu berpikir runtut atau sistematis, berwawasan luas, bukan jago kandang, konsisten, mudah untuk dihubungi dan orang yang mempunyai pemahaman dunia jurnalistik.³⁸

Kegiatan jurnalistik yang dapat dilakukan oleh sebuah lembaga dalam rangka publikasi informasi dapat diterapkan melalui: *Pertama*, penyebaran siaran pers (*press release*), yaitu kegiatan pembuatan dan penyebaran siaran pers yang biasanya berupa lembaran siaran berita yang dibagikan kepada wartawan atau media massa, baik melalui kurir maupun lewat faksimili ke kantor media yang dituju. *Kedua*, konferensi pers atau jumpa pers, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan menjelang, menghadapi ataupun setelah terjadi peristiwa atau kegiatan penting dan besar. *Ketiga*, kunjungan pers, yaitu kegiatan pemerintahan dalam rangka mengajak wartawan untuk berkunjung ke suatu lokasi, baik yang berada di lingkungan sendiri maupun ke lokasi yang memiliki kaitan erat dengan kiprah lembaga tersebut. *Keempat*, resepsi pers, yaitu suatu kegiatan yang biasanya dilakukan oleh banyak perusahaan besar dan pemerintahan negara-negara maju. Kegiatan ini tidak harus selalu menyiapkan bahan

³⁸ Aceng Abdullah, *op cit.*, hlm. 68-79.

rilis, bahkan dalam acara ini sama sekali tidak ada bahan informasi untuk wartawan. Mereka hanya diundang sekedar untuk makan-makan dan menikmati hiburan. *Kelima*, peliputan kegiatan, yaitu suatu kegiatan yang menjadi sasaran peliputan wartawan jika mengandung nilai jurnalistik. *Keenam*, wawancara pers, yaitu kegiatan dalam rangka memperoleh informasi melalui tanya jawab dengan sumber berita baik melalui wawancara yang dipersiapkan maupun secara spontan yaitu kegiatan tanya jawab seorang wartawan dengan sumber berita yang dilakukannya secara mendadak ketika secara tiba-tiba bertemu dengan sumber berita yang menjadi sasaran informasi lebih lanjut.³⁹

Menurut Jakob Oetama, dalam bukunya yang berjudul “Perspektif Pers Indonesia”, ia menyatakan bahwa relasi antara pers (media massa) dan pemerintah dalam rangka mencari dan membuat berita, bukanlah relasi sepihak, ada peranan dari pemerintah, dan ada peranan dari pers. Ia menegaskan, relasi timbal balik itu akan lebih dapat diketahui dengan mengetahui siapa lebih kuat, siapa mempengaruhi siapa, dan dalam kadar yang bagaimana.⁴⁰ Hubungan pers dan pemerintah dalam sistem demokrasi Indonesia saat ini bukan tunduk, tidak juga bermusuhan, tetapi seiring atau *partnership* dan dalam bentuk interaksi positif. Interaksi positif dalam rangka menjalin hubungan baik dan hubungan seiring, dapat menjadi terganggu, ketika pers (media massa) melakukan kontrol dan

³⁹ *Ibid.*, hlm. 80-99.

⁴⁰ Jakob Oetama, *Perspektif Pers Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 46.

koreksi sebagai salah satu tugas pers yang penting.⁴¹ Sehingga hubungan antara media massa dengan pemerintah menurut Jacob Oetama adalah saling mempengaruhi (timbang balik), seiring, kerjasama dan memiliki karakter interaksi positif (berhubungan secara positif).

Media massa adalah pihak yang menyusun berita, baik dari bahan yang dikumpulkan atas prakarsa mereka maupun bahan yang diperoleh dari keterangan media itu sendiri, pada akhirnya penyusun dan penyaji berita adalah pihak media massa. Akan tetapi, hal ini tidak berarti bahwa media massa senantiasa berada dalam posisi yang paling berpengaruh atau paling memberikan warna. Senantiasa yang terjadi dalam hal ini adalah *proses interaksi*. Media massa adalah agen dalam penyampaian informasi, maka melalui komunikasi terbuka yang dilakukan pemerintah, maka pemerintah menjadi lebih terbuka. *Keterbukaan* ini menjadi tanda berlakunya suatu pemerintahan yang demokratis, sebab masyarakat dapat menyampaikan pesan dan masukannya secara terbuka. Keterbukaan juga berarti kontrol. Mencapai proses komunikasi terbuka dalam pemerintahan, dapat melalui lalu lintas pesan dengan media massa. Masyarakat serentak mengetahui apa yang menjadi pesan. Uraian tersebut, mengindikasikan bahwa, jika pejabat atau instansi pemerintah menyampaikan suatu pesan secara terbuka melalui media massa, maka berbagai pertimbangan dan tujuan menjadi sandarannya. Apakah sekedar menyampaikan pesan agar diketahui, untuk memancing reaksi, untuk memulai proses pembentukan pendapat umum,

⁴¹ *Ibid*, hlm. 55-56.

untuk peringatan bagi instansi-instansi yang bersangkutan, atau sebagai peringatan bagi masyarakat untuk menetralsir suatu isu. Relasi kedua pihak dapat terlihat pada posisi media massa yang berperan sebagai komunikator, dalam hal ini penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Masuk akal apabila pemerintah menjadi sumber pokok pemberitaan media, maka di sentra-sentra pengambilan keputusan dan pemerintahan, ditempatkan wartawan-wartawan.⁴² Media massa memiliki pertimbangan yang menjadi sandarannya dalam mencari berita dari sumber pemerintah, yaitu:⁴³

- 1) Menyampaikan segala pesan pemerintah dan berbagai instansinya, adalah pesan yang patut diketahui masyarakat. Maksudnya, agar terjadi komunikasi dalam proses pemerintahan dan terjadi pula penyebaran pengetahuan tentang kebijakan pokok, tindak lanjut, rencana dan masalah-masalah yang dihadapi pemerintah. Pemerintah sendiri menghargai kecepatan dari keserentakan media dalam menjalankan peranan tersebut. Lebih cepat dari pada komunikasi melalui nota dinas, instruksi dan lain-lain. Hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa media massa menjadi perangkat yang sama eksistensialnya dengan lembaga-lembaga masyarakat maupun pemerintah lainnya.
- 2) Media disamping sebagai komunikator umum dalam menggali bahan berita, perlu bagi media melakukan pengecekan atas bahan tersebut. Jika bahan berita itu mengandung hal-hal negatif, mungkin instansi yang bersangkutan enggan memberi keterangan, sehingga dapat timbul persoalan. Hal ini perlu dilengkapi dengan pertimbangan lain, yakni apa yang biasa dikenal sebagai hak publik untuk mengetahuinya. Ini merupakan pandangan dari demokrasi. Jika bahan dari media mengenai berita tidak dilengkapi dengan data yang proporsional atau latar belakang, kemudian media massa mempublikasikannya, maka akan merugikan pemerintah. Pemerintah adalah sumber berita, namun disisi lain pemerintah adalah pembaca berita.

⁴² *Ibid.*, hlm. 47-48.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 51.

Media massa menghendaki agar pesan yang dihasilkannya juga dapat direspon oleh pemerintah sebagai khalayak pembaca. Relasi antara media massa dan pemerintah dalam sistem demokrasi Indonesia ini bukanlah “tunduk” tidak juga bermusuhan, tetapi sering disebut “*partnership*”. Relasi kedua lembaga itu adalah relasi yang dibawa oleh kepentingan bersama untuk menyampaikan dan menerima pesan kontrol sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada kepentingan rakyat banyak. Relasi itu berada pada semangat kerjasama, semangat seiring, semangat kekeluargaan yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia.⁴⁴

Jadi, pisau analisis yang dipergunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah berasal dari Jakob Oetama di atas, yaitu **relasi timbal balik**, yaitu hubungan saling mempengaruhi, seiring atau *partnership*, terjalannya kerjasama dengan interaksi positif (berhubungan secara positif). Melalui relasi ini, penulis akan memperoleh pengetahuan tentang siapa yang lebih kuat, siapa mempengaruhi siapa, dan dalam kadar yang bagaimana relasi kerja antara DPRD Kabupaten Temanggung dengan media massa yang digunakan itu tercipta.

H. METODE PENELITIAN

Penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 59.

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.⁴⁵

1. Sumber dan Fokus Penelitian

Sumber dalam penelitian ini adalah Ketua Komisi A, Bapak Herie Kusworo, SH.; Anggota Komisi B, Bapak Akhmad Masfudin; Ketua Komisi C, Bapak Drs. Djoko Juwono; Anggota Komisi D, H. Iman Bintara, ST.; Anggota Komisi D, H. Taufan Sugiyanto, S. Pd., dan Kepala Bagian Umum Rapat & Risalah DPRD, Bapak Supriyanto, SH. Disamping itu peneliti menjadikan wartawan media massa sebagai informan. Adapun pihak surat kabar Suara Merdeka dan Wawasan, Pak Henri Sofyan dan Pak Heri adalah *interviewee* atau orang yang dimintai informasi terkait penelitian ini, disamping Bapak Rofi dan Ibu Lily Setyowati dari Radio RT FM dan Angkasa 7 serta Bapak Yon Daryono Saputro dan Bapak Kiswantoro dari wartawan SCTV dan METRO TV. Sedangkan pihak Humas Pemerintahan Kabupaten adalah sumber dalam mendapatkan kliping surat kabar terkait dengan bahan hasil pelaksanaan metode dokumentasi.

Adapun fokus dalam penelitian ini adalah *Relasi kerja DPRD Kabupaten Temanggung dan Media Massa, yang terdiri atas: kebutuhan DPRD terhadap publikasi informasi, keterbukaan dewan dalam menyampaikan informasi dan keterbukaan dewan dalam memberikan akses informasi.*

⁴⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), hlm. 3.

2. Metode Pengumpulan Data

Sebuah penelitian tentunya memiliki metode dalam pengumpulan data. Adapun yang menjadi metode dalam pengumpulan data di sini adalah:

a. Metode Dokumentasi

Menurut Irawan dalam buku Metodologi Penelitian karya Sukandarrumidi, studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada sumber penelitian.⁴⁶ Metode ini merupakan cara peneliti untuk mengumpulkan data yang berupa dokumen-dokumen dari sumber dan informan penelitian.

Dokumen tersebut berupa kliping koran Suara Merdeka dan Wawasan, yang diperoleh dari Bagian Humas Pemerintahan Kabupaten dan Alat Kelengkapan DPRD Masa Bhakti 2004-2009, Visi-Misi serta Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, yang diperoleh Bagian Umum Rapat & Risalah DPRD.

b. Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sesuatu obyek dengan sistematis fenomena yang diselidiki. Observasi melibatkan 2 komponen, yaitu si pelaku observasi yang lebih dikenal sebagai *observer* dan obyek yang diobservasi yang dikenal sebagai *observee*.

Jenis observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi nonpartisipan. Maksudnya, dalam observasi nonpartisipan, peneliti

⁴⁶ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004), hlm. 100-101.

berada di luar subyek yang diamati dan tidak ikut ke dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan.

Adapun petunjuk melakukan observasi adalah peneliti mengetahui secara garis besar hal apa yang diobservasi, menyelidiki tujuan umum dan tujuan khusus untuk menentukan apa yang diobservasi, serta melakukan observasi secermatnya dan bersifat kritis. Disamping itu, berdasarkan cara pengamatannya, peneliti menggunakan metode observasi terstruktur. Penelitian ini diarahkan pada pemusatan perhatian pada hal tertentu sehingga disusun pedoman tentang hal itu apa saja yang harus diamati.⁴⁷

Penelitian ini dilakukan dengan pengamatan terhadap kondisi obyektif DPRD Kabupaten Temanggung serta mengamati dan mencatat bagaimana pihak wartawan/reporter pada saat meliput berita di gedung DPRD Kabupaten Temanggung. Melalui metode ini, peneliti mendapat pengetahuan terkait dengan kegiatan para anggota dewan yang melakukan interaksi dengan pihak media massa, yaitu para reporter/wartawan, sehingga *obsever* mengamati secara langsung bahwa anggota dewan benar-benar melakukan interaksi dengan pihak media massa. Selain itu, melalui pengamatan yang berlangsung, peneliti mengamati adanya akses yang didapat ketika reporter berusaha memperoleh informasi dari Gedung DPRD Kabupaten Temanggung .

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 69-73.

c. Metode Interview⁴⁸

Interview dikenal pula dengan istilah wawancara, yaitu dapat diartikan sebagai suatu proses tanya jawab secara lisan baik melalui dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar dengan telinga sendiri dari suaranya. Interview dapat diketahui ekspresi muka, gerak-gerik tubuh yang dapat *dicheck* dengan pertanyaan verbal. Melalui interview dapat diketahui tingkat penguasaan materi.

Pada saat akan mengadakan interview, peneliti memiliki tugas yang berupa pengajuan pertanyaan dan harus mencatat, merekam atau mengingat hasil jawaban informan, kemudian melakukan *prodding*, yaitu menggali keterangan yang lebih mendalam berdasarkan atas keterangan jawaban terdahulu.

Jenis interview yang digunakan oleh peneliti adalah Interview Bebas Terpimpin. Interview ini merupakan bentuk interview yang memadukan antara jenis Interview Terpimpin dan Interview Tak Terpimpin. Interview ini mempergunakan pedoman (*interview guide*) yang telah dipersiapkan dalam rangka tanya jawab, namun secara garis besar saja, sehingga terjadi adanya penambahan dalam proses tersebut. Disamping itu, *interview guide* berfungsi sebagai kriteria pengontrol. Peneliti membawa kerangka pertanyaan untuk disajikan, namun untuk waktu tergantung dengan kesepakatan dengan *interviewee* (narasumber).

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 88-96.

Mengenai cara penyampaian pertanyaan dengan kelengkapan serta sistematisnya *draft* pertanyaan, peneliti memberikan secara dialektis yang santai dengan ramah dan santun, sehingga proses wawancara dapat berjalan dengan nyaman. Oleh karena itu, data yang dibutuhkan dapat diperoleh, berbeda ketika kita dalam keadaan tegang dan *nervous* atau gugup, hasil yang didapat akan parsial atau tidak utuh karena tidak menikmati wawancara dengan baik.

Metode Interview yang dipergunakan oleh peneliti, diterapkan kepada sumber dan informan penelitian. Melalui metode ini, peneliti memperoleh data mengenai media massa (surat kabar, televisi dan radio) yang digunakan oleh DPRD Kabupaten Temanggung, dan beberapa materi yang menjadi bahan informasi ke publik melalui media massa serta pola interaksi yang dilakukan dewan terhadap media massa.

3. Validitas Data⁴⁹

Peneliti menggunakan triangulasi dalam melakukan pengecekan data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Menurut Denzin, dalam bukunya Lexy tentang Metodologi Penelitian Kualitatif, bahwa terdapat empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan *sumber, metode, penyidik* dan *teori*. Menurut Patton, dalam buku karya Lexy dengan judul yang sama, Triangulasi dengan *sumber* berarti

⁴⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 330-332.

membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini dapat dicapai dengan jalan: 1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; 2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi; 3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu; 4) membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti orang pemerintahan; 5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Teknik ini berusaha dilakukan untuk mengetahui adanya alasan-alasan terjadinya perbedaan-perbedaan, bukan mengharapkan bahwa hasil pembandingan tersebut merupakan kesamaan pandangan, pendapat atau pemikiran. Pada triangulasi dengan *metode*, menurut Patton, terdapat dua strategi, yaitu: 1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan 2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Teknik triangulasi jenis ketiga ialah dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamat lainnya membantu mengurangi kemelencengan dalam pengumpulan data. Triangulasi dengan *teori*, menurut Lincoln dan Guba dalam buku Metodologi Penelitian Kualitatif, karya Lexy, berdasarkan anggapan

bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu lebih teori.

Triangulasi dipergunakan peneliti untuk *me-recheck* hasil pengumpulan data dengan jalan membandingkannya dengan berbagai *sumber, metode, atau teori*. Untuk itu, peneliti menggunakan jalan: mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai sumber data dan memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan. Dalam penelitian ini data primer terdapat pada hasil interview.

4. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif, atau menggambarkan keadaan fokus penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang terjadi atau bagaimana adanya.

Kegiatan pengolahan data dimulai sejak masuknya informasi pendahuluan yaitu pada saat dokumentasi hingga interview. Data yang diolah adalah yang dinilai sebagai data akhir yang tidak mungkin berubah.

Pengolahan atau analisa data dilakukan untuk menemukan makna setiap data relasinya antara yang satu dan yang lain dan memberikan tafsiran yang dapat diterima akal sehat dalam konteks masalahnya secara keseluruhan, untuk itu data formal yang telah dikumpulkan dipilah-pilah dan dikelompokkan sesuai dengan rincian masalahnya masing-masing. Kemudian data tersebut dihubungkan dan dibandingkan satu dengan yang lainnya. Menggunakan proses berfikir induktif dan deduktif yang

merupakan jenis pola penalaran. Induktif yaitu suatu pola berfikir yang menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Pola penalaran induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi dan diakhiri dengan penyimpulan yang bersifat umum. Sedangkan pola deduktif yaitu pola berfikir yang bertitik tolak dari pernyataan yang bersifat umum, dan menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penarikan kesimpulan dengan pola deduksi biasanya menggunakan pola pendekatan silogisme. **Silogisme** disusun dari dua buah pernyataan dan sebuah kesimpulan. Pernyataan yang mendukung silogisme disebut **premis**, yang dibedakan menjadi premis mayor dan premis minor. **Premis mayor** mempunyai ruang lingkup yang relatif luas, sedangkan **premis minor** mempunyai ruang lingkup relatif sempit atau terbatas.⁵⁰

⁵⁰ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, op cit., hlm. 38-40.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti dalam bab sebelumnya, mengenai *relasi antara DPRD dengan media massa*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Relasi Kerja DPRD dengan Surat Kabar

- a. Kebutuhan akan publikasi informasi dimiliki oleh DPRD dan surat kabar. Namun, DPRD kurang memiliki inisiatif dalam rangka melibatkan surat kabar Suara Merdeka dan Wawasan untuk mempublikasikan informasi terkait hasil fungsi pengawasan terhadap eksekutif. Oleh karena itu, kekuatan kebutuhan tersalurnya informasi melalui media ke masyarakat luas dimiliki oleh surat kabar. Meskipun dalam rangka memberi penerangan pers, pimpinan cenderung tertutup dan anggota dewan menggunakan prinsip *terbuka terbatas, apa adanya dan ada apanya*. Surat kabar (Suara Merdeka dan Wawasan) adalah media massa yang lebih intens dalam menyebarkan dan menggali informasi tentang dewan dibanding media massa lain. Hubungan antara DPRD dan surat kabar dapat dikatakan seiring atau *partnership*. Dewan menganggap wartawan adalah rekan bagi mereka meskipun interaksi positif pernah terganggu akibat adanya gesekan yang terjadi diantara keduanya, namun hubungan yang terjalin diantara keduanya tetap baik.

b. Jika dilihat dari pengaruh besar yang ada, maka surat kabar lebih memiliki kekuatan dalam mempengaruhi masyarakat melalui informasi yang dipublikasikannya tersebut, terkait dengan fungsi pengawasan dewan terhadap deksekutif. Sehingga hal itu juga menguntungkan bagi pihak dewan karena adanya sosialisasi ke masyarakat.

2. Relasi DPRD dengan Televisi

a. Jika dilihat dari kekuatan akan kebutuhan terpublikasinya informasi ke khalayak publik, maka dewan dinilai kurang memiliki intensitas yang tinggi dibanding dengan televisi. Disamping itu, dewan memiliki keterbatasan dalam menyampaikan informasi ke televisi karena televisi merupakan media yang memiliki sifat pemberitaan yang cenderung sensasional dan mengandung unsur konflik. Televisi dan DPRD tetap memiliki hubungan seiring atau *partnership* jika dilihat dari kebutuhan dan sikap dewan yang menganggap televisi adalah rekan bagi mereka. Selain itu, interaksi positif terlihat dalam relasi ini, karena keduanya belum pernah terjadi gesekan dalam hal pemberitaan.

b. Pengaruh yang besar terhadap informasi sampai ke masyarakat dimiliki oleh televisi karena media tersebut mempunyai peran tersosialisasikannya informasi tentang dewan ke masyarakat terkait dengan pengawasan dewan terhadap eksekutif agar diketahui

masyarakat luas. Walaupun dalam realitasnya, dewan cenderung tidak melibatkan televisi saat menghimpun aspirasi masyarakat dilapangan.

3. Relasi DPRD dengan Radio

- a. Kebutuhan tersalurkannya informasi ke masyarakat tentang hasil fungsi pengawasan dewan terhadap eksekutif tidak kuat dimiliki oleh dewan Kabupaten/Kota Temanggung, dibanding dengan radio. Hal ini dibuktikan dengan inisiatif dari pihak radio yang menempatkan reporternya untuk mengikuti anggota dewan dalam melaksanakan kinerjanya. Meskipun demikian, hubungan seiring atau *partnership* tetap dimiliki dalam relasi ini, karena masing-masing pihak memiliki kebutuhan akan tersalurnya informasi bagi kepentingan masyarakat luas. Disamping itu, pola interaksi positif tetap terjaga dalam relasi disini.
- b. Jika dilihat siapa yang mempengaruhi siapa, maka anggota dewan lebih dipengaruhi oleh informasi hasil pemberitaan terkait dengan fungsi pengawasan terhadap eksekutif yang disampaikan oleh pihak radio ke masyarakat luas.

B. KRITIK DAN SARAN

1. DPRD Kabupaten Temanggung

- a. Dalam rangka menyampaikan informasi terkait dengan hasil-hasil kinerja dewan sudah sepantasnya bagi dewan untuk berinisiatif menyalurkan ke media massa agar masyarakat mengetahui. Oleh

sebab itu, keaktifan dewan dalam merangkul media sangat diharapkan.

- b. DPRD merupakan lembaga legislatif yaitu sebagai wakil rakyat, sehingga apapun informasi yang berkaitan dengan dewan sudah selayaknya diketahui masyarakat yaitu salah satunya dengan memberikan penerangan pers melalui media massa.
- c. Keberadaan humas untuk mendapatkan informasi baik menyangkut agenda-agenda kegiatan dewan maupun hasil kinerja dewan sebaiknya dioptimalkan, sehingga wartawan media massa dapat dengan mudah mendapatkan akses informasi yang valid.

2. Media Massa

Media massa merupakan media komunikasi antara DPRD dengan rakyat yang diwakilinya. Oleh karena itu, dalam rangka pemberitaan sebaiknya tidak memihak lembaga tertentu yang dapat menyebabkan kenetralitasan seorang wartawan media massa menjadi terganggu. Sehingga masyarakat disajikan berita yang faktual dan tidak berat sebelah.

C. KATA PENUTUP

Alhamdulillahirabbilalamin, segala puji bagi Allah penulis panjatkan. Atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan mencurahkan segala kemampuan, baik pikiran, tenaga, biaya maupun waktu demi kesempurnaan skripsi yang penulis susun ini,

walaupun bukan dalam arti kesempurnaan yang sebenarnya. Kesempurnaan hanya milik Allah, penulis berusaha secara optimal untuk mewujudkannya, Meskipun banyak hambatan yang terjadi, baik secara personal maupun kelembagaan sehingga skripsi ini dapat dikatakan selesai dengan tidak mudah.

Kekurangan dalam penyelesaian akhir skripsi ini pastilah ada, namun semoga bukan menjadi hal yang sangat substansial yang terjadi dalam skripsi yang telah disusun ini. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran dari pembaca demi lebih bermanfaatnya skripsi ini untuk berbagai pihak.

Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada pembimbing dan semua pihak yang turut membantu serta mengarahkan penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberi kontribusi bagi pihak terkait dan bermanfaat secara luas bagi semua pihak. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Abdullah, Aceng, 2000, *Press Relations; Kiat Berhubungan dengan Media Massa*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Effendy, Onong Uchjana, 2002, *Dinamika Komunikasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Effendy, Onong Uchjana, 2003, *Ilmu Komunikasi; Teori dan Praktek*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Effendy, Onong Uchjana, 2003, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- McQuail, Denis, 1991, *Teori Komunikasi Massa; Suatu Pengantar, Edisi Kedua*, Terj. Agus Dharma, dkk, Jakarta: Erlangga.
- Moleong, Lexy J., 1998, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J., 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, 2005, “*Peran Pers sebagai Media Informasi Politik*” (*Studi Deskriptif tentang Respon Masyarakat Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan. Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tentang Peran Media Massa Kedaulatan Rakyat sebagai Media Informasi Politik*), *Skripsi*, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD), Yogyakarta.
- Nimmo, Dan, 1993, *Komunikasi Politik; Komunikator, Pesan dan Media*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurudin, 2003, *Komunikasi Massa*, Yogyakarta: CESPUR.
- Nurudin, 2003, *Pers dalam Lipatan Kekuasaan*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Nurudin, 2005, *Sistem Komunikasi Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Nurudin, 2007, *Pengantar Komunikasi Massa*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Oetama, Jakob, 1989, *Perspektif Pers Indonesia*, Jakarta: LP3ES.

- Pareno, Sam Abede, 2005, *Media Massa antara Realitas dan Mimpi*, Surabaya: Papyrus.
- Prasetyo, Urip, 2003, “*Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Komunikasi Politik*” (*Studi Penelitian Deskriptif tentang Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Wonosobo*), Skripsi, TT. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD), Yogyakarta.
- Rivers, William L., dkk, 2003, *Media Massa dan Masyarakat Modern, Edisi Kedua*, Terj. Haris Munandar dan Dudy Priatna, Jakarta: Kencana.
- Salam, Zarkasji Abdul, dkk, 1996, *Pedoman Penelitian IAIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: Balai Penelitian P3M IAIN Sunan Kalijaga.
- Sanit, Arbi, 1985, *Perwakilan Politik di Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Sukandarrumidi, 2004, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sulung, Ilham, 2006 “*Analisis Pola Relasi Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat dalam Politik di Indonesia*” (*The Analysis of Susilo Bambang Yudhoyono and Democratic Party Relations Pattern in Indonesia Politics*), Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Yogyakarta.
- Wibisono, Budi Satriya, 2002, “*Pelaksanaan Fungsi Perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Perspektif Komunikasi Politik*” (*Studi Penelitian Deskriptif pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)*), Skripsi, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD), Yogyakarta.
- Wiryanto, 2000, *Teori Komunikasi Massa*, Jakarta: PT Grasindo.

Sumber Kamus dan Kitab UU:

- Anwar, Dessy, 2001, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Abdi Tama.
- Undang-Undang Partai Politik*, 2007, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang RI No. 32 Th. 2002 dan Peraturan Menkominfo Th. 2007 Tentang Penyiaran dan Undang-Undang RI No. 40 Th. 1999 Tentang Pers*, 2007, Bandung: Citra Umbara.

Dokumen milik DPRD Kabupaten Temanggung

Tata Tertib (Perubahan Kedua) DPRD Kabupaten Temanggung, Nomor:
DPRD.59/5II/VI/2006.

Buku: *Mengenal DPRD Kabupaten Temanggung* yang diterbitkan pada tahun
2004.

Lain-lain:

Kliping Surat Kabar Harian Suara Merdeka dan Wawasan periode 2005 - 2008